

## PENGARUH KUALITAS KREDIT YANG DIKLASIFIKASIKAN TIDAK PRODUKTIF SEKTOR KONSTRUKSI TERHADAP TINGKAT KESEHATAN KREDIT PADA BANK JABAR BANTEN CABANG BEKASI

Didin Rasyidin Wahyu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bina Bangsa

Email: didinrasyidinwahyu@gmail.com

### ABSTRACT

*Banks as financial institutions whose activities include collecting funds from the public in the form of deposits such as savings, deposits, demand deposits and other forms of savings and channel them back to the community in order to improve the living standard of the people in the form of loans / credit. Bank may also be regarded as an institution that won the trust of the public, so the public trust must be maintained, then the bank must satisfy the clients as much as possible in carrying out its activities both in service, fund raising and distribution, financial information and other services in the field. Bank Jabar Banten as banking and business institutions as one of the fittings has a mission and local autonomy as a function of (a) Driving and driving the pace of development in the area, (b) Holders of Local Cash and / or implementing storage area is money, (c) One Local revenue sources. Based on the mission and functions carried the Bank Jabar Banten, in order to participate in promoting the pace of development continues, Bank Jabar Banten loans / credits to employers, employees, the propesi, and others.*

**Keyword:** Credit quality, construction sector, good credit.

### ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito seperti tabungan, deposito, giro dan bentuk tabungan lainnya serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit. Bank juga dapat dianggap sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga kepercayaan publik harus tetap terjaga, maka bank harus memuaskan nasabah semaksimal mungkin dalam menjalankan kegiatannya baik dalam pelayanan, penggalangan dana maupun distribusi, informasi keuangan dan layanan lainnya di lapangan. Bank Jabar Banten sebagai perbankan dan lembaga usaha sebagai salah satu alat kelengkapan memiliki misi dan otonomi daerah sebagai fungsi (a) Mendorong dan mendorong laju pembangunan di daerah, (b) Pemegang Kas Daerah dan/atau pelaksana tempat penyimpanan adalah uang, (c) Satu sumber pendapatan daerah. Berdasarkan misi dan fungsi yang diusung Bank Jabar Banten, agar dapat ikut mendorong laju pembangunan terus berlanjut, Bank Jabar Banten memberikan pinjaman/kredit kepada pengusaha, karyawan, propesi, dan lain-lain.

**Kata kunci:** Kualitas kredit, sektor konstruksi, kredit yang baik.

### PENDAHULUAN

Masalah yang dihadapi Bank Jabar Banten Cabang Bekasi adalah timbulnya kredit bermasalah pada sektor konstruksi karena selama ini pemberian kredit modal kerja sektor konstruksi dianggap yang paling aman, namun ternyata mengandung resiko dan akhirnya bermasalah. Permasalahan tersebut terjadi diakibatkan adanya penyalahgunaan pinjaman yang diberikan kepada pengusaha/pemborong dan adanya kesengajaan pemborong menyalurkan hasil termyn proyek tidak ke Bank Jabar Banten Cabang Bekasi melainkan

kepada bank lain, hal tersebut agar dana termyn tidak dipotong atau tidak diperhitungkan dengan kreditnya. Dan permasalahan tersebut tidak terlepas pula dengan Sumber Daya Manusia di Bank, karena sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan administrasi pemberian kredit kurang memadai baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya perlu ada peningkatan. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena dalam setiap pelaksanaan untuk mencapai tujuan organisasi, pengaruh dan factor manusia paling dominan. Dalam penelitian ini penulis akan menekankan pada upaya dalam menelaah sebab terjadinya kredit bermasalah pada kredit sektor konstruksi. Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian terhadap kebijakan pemberian kredit modal kerja sektor konstruksi dengan berpijak pada manajemen dan kebijakan perkreditan bank. Hal tersebut dengan tujuan Untuk memberikan gambaran umum bahwa penyaluran kredit modal kerja sektor konstruksi cukup berpengaruh pada tingkat kesehatan kredit serta potensinya dalam membantu meningkatkan ekspansi kredit, Untuk melakukan evaluasi efektifitas hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan penyaluran kredit modal kerja sektor konstruksi.

Salah satu kegiatan perbankan sebagaimana disebut diatas yaitu penyaluran dana berupa pemberian bantuan kredit modal kerja, dimana salah satunya berupa penyaluran Kredit Modal Kerja sektor Konstruksi (dalam rangka Keppres Nomor 16 tahun 1994). Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan pokok dari perbankan dan merupakan sumber pendapatan bagi usaha perbankan. Sebagaimana dikemukakan diatas, bertitik tolak dari misi yang diemban Bank Jabar Banten tersebut dan dalam rangka turut mendorong laju pembangunan, Bank Jabar Banten telah menyalurkan pinjaman/kredit modal kerja sektor konstruksi kepada para pengusaha khususnya para pengusaha yang berdomisili diwilayah kerja Bank Jabar Banten Cabang Bekasi. Namun demikian apabila kita mengamati neraca bank, maka akan terlihat jumlah kredit yang diberikan merupakan kelompok dari earning assets atau aktiva produktif yang mendominasi sisi aktiva dalam neraca yang senantiasa mengandung resiko yang besar apapun jenis dan sektornya. Sehingga apabila terjadi kerugian karena tidak diterimanya kembali pelunasan pokok kredit maupun pembayaran bunga dan kewajiban lainnya akan mempengaruhi kualitas aktiva produktif, tingkat rentabilitas bank dan tingkat kesehatan kreditnya serta sering menjadi penyebab utama suatu bank menghadapi "masalah".

Pencairan Kredit dapat dilaksanakan setelah kelengkapan administrasi permohonan dan akad perjanjian kredit telah terpenuhi seluruhnya. Pencairan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pelaksanaan fisik proyek dilapangan. Untuk debitur yang menyediakan dana sendiri berupa uang tunai, penarikan kredit dapat dilaksanakan setelah dana sendiri tersebut telah habis terserap biaya proyek. Kepada pemimpin proyek agar dikirimkan surat pemberitahuan bahwa bank telah merealisasi bantuan pembiayaan proyek kepada kontraktor yang mendapat pekerjaan dari yang bersangkutan. Pimpinan proyek diminta bantuan pengamanan pelaksanaan proyek dengan mentransfer pembayaran termyn proyek tersebut kerekening kontraktor di Bank. Kualitas Aktiva produktif adalah keadaan pembayaran pokok dan atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. "Kualitas aktiva produktif dinyatakan sehat prosentasinya antara 0-3,5 %, cukup sehat antara 3,5-5,6 %, kurang sehat antara 5,6 %-7,85 % dan tidak sehat apabila lebih besar dari 7,85 %". Pengukuran kualitas kredit didasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar. "Hasil dari pengukuran tersebut dinyatakan dalam Penggolongan kualitas aktiva produktif yaitu lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*Special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtfull*), dan macet (*loss*)".

"Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang mempunyai sebutan Bank Jabar Banten adalah bank umum milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan Banten bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten. Pendirinya dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Indonesia milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, NV. DENIS berkedudukan di Bandung berikut semua anak perusahaannya dinyatakan dinasionalisasi dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari penyerahan tersebut Pemerintah Daerah tingkat I Jawa Barat mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dengan akta nomor 125 tanggal 19 Nopember 1960, akta nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan akta nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Noezar di Bandung dengan modal dasar Rp. 2,500,000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali penyesuaian modal dasar. Kemudian bentuk

hukumnya menjadi Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961.

Berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 Nopember 1992 status Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Devisa, serta berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 1995 bditetapkan sebutan “Bank Jabar Banten” dengan logo baru. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 dan berdasarkan akta notaris Poppy Kuntari Sutresna, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan nomor C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 39 tanggal 14 Mei 1999 bentuk hukum Bank Jabar Banten diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 April 2010 disetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp. 1 triliun”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2011 berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 14 April 2011, modal dasar Bank Jabar dinaikkan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2 triliun. Melihat perkembangan prospek usaha yang terus membaik, hasil RUPS tanggal 5 April 2006 menetapkan kenaikan modal dasar Bank Jabar dari Rp 2 triliun menjadi Rp 4 triliun. Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut SK Gubernur BI Nomor 9/63/kep.gbi/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan penggantian *call name* dari “Bank Jabar” menjadi “Bank Jabar Banten”. Sehubungan dengan kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Jabar Banten melakukan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Jabar Banten Syariah. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT Bank Jabar Banten Syariah No.4 tanggal 15 Januari 2010, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, bank **bjb** memiliki penyertaan sebanyak 1.980.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta) saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Anak Perusahaan. Bank Jabar Banten Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Pemberian

Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah. Seiring dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dan sesuai Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo, serta Surat Keputusan Nomor 1337/SK/DI(R-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama Bank Jabar Banten resmi berubah menjadi bank **bjb**. bank **bjb** merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Juli 2010. bank **bjb** menawarkan saham kepada publik sejumlah 2.424.072.500 lembar saham Seri B (termasuk EMSA) dengan harga penawaran Rp 600,- per saham dimana dana yang diperoleh dari IPO sekitar Rp 1,4 triliun.

Pelepasan saham ke masyarakat ini setara dengan 25% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dipergunakan oleh bank **bjb** untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka mendukung ekspansi kredit, terutama sektor UMKM, perluasan jaringan, dan pengembangan teknologi informasi. Penawaran Umum Perdana Saham bank **bjb** memperoleh minat yang relatif besar dari investor domestik maupun luar negeri. Dalam Penawaran Umum kepada masyarakat tanggal 1, 2 dan 5 Juli 2010, permintaan saham bank **bjb** mengalami *oversubscribed* sebesar 11,2 kali untuk porsi *pooling*. Dengan perjalanan panjang yang sudah ditempuh, bank **bjb** mengajak bersama *stakeholdernya* menuju era baru perbankan nasional. “Dan sampai saat ini, jaringan usaha yang dimiliki Bank Jabar Banten tersebar di daerah kota/ kabupaten di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam menelaah permasalahan yang terjadi terhadap kredit bermasalah pada kredit modal kerja sektor konstruksi adalah dengan cara penelitian intern yaitu melihat data kuantitatif seperti nominative kredit, kolektibilitas kredit, administrative kredit dan berkas/berkas kredit dan dengan cara ekstern yaitu meninjau lokasi proyek yang dibiayai, mengunjungi pemimpin proyek dan bendaharawan proyek serta mengunjungi pengusaha/ pemborong yang telah mendapat pinjaman modal kerja. “Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Adapun pengertian kredit konstruksi adalah ”Investasi atau modal kerja untuk pembiayaan dalam sektor konstruksi, pengadaan atau jasa konsultasi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah” Jenis kredit konstruksi yang dapat diberikan meliputi (1) Kredit investasi untuk tujuan pemberian/pengadaan barang modal dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/proyek, (2) Modal kerja untuk tujuan pengadaan, pembelian bahan dan upah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/proyek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Perkembangan Bank Jabar Banten Cabang Bekasi, disajikan indikator penting dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 seperti terlihat dalam Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan Bank Jabar Banten Cabang Bekasi

No	Keterangan	2010	2011	Kenaikan	%
1	Total Asset	175.808	145.226	-30.582	-17,40
2	Dana Pihak ketiga	161.136	120.559	-40.577	-25,18
3	Kredit	57.202	77.362	20.160	35,24
4	Total Pendapatan	23.348	29.779	6.431	27,54
5	Total Biaya	21.166	26.250	5.084	24,02
6	Pendap. Bunga Krd.	10.656	13.655	2.999	28,14
7	Biaya Bunga	14.267	17.247	2.980	20,89
8	Laba sbllm pajak	2.182	3.529	1.347	61,73
9	AKYDTP	935	595	-340	-36,36
10	ROA (%)	1,24	2,43	1,19	95,97
11	LDR (%)	35,50	64,07	28,57	80,48
12	AKYDTP (%)	1,43	0,77	-0,66	-46,15
13	KAP (%)	98,57	99,23	0,66	0,67

Bank Jabar Banten Cabang Bekasi dilihat pada table 1, sampai dengan akhir tahun 2011 telah menyalurkan kredit sebesar Rp. 77.362 juta dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.160 juta dari tahun 2010 atau naik sebesar 35,24%. Dari kenaikan kredit yang diberikan tersebut Non Performing Loan (NPL) membaik sebesar 0,66% yaitu dari sebesar 1,43 menjadi 0,77%. Namun demikian, walaupun NPL terdapat perbaikan tetapi dalam pemberian kredit sampai dengan tahun 2011 terdapat kredit bermasalah mulai dari katagori dapersus, kurang lancar, diragukan sampai macet secara keseluruhan sebesar Rp.1.500 juta, yang terdiri (1) KMK Umum sebesar Rp. 289 juta, (2) KI Umum sebesar Rp. 399 juta, (3) KMK Konstruksi sebesar Rp. 545 juta, (4) KGB sebesar Rp. 229 juta, (5) Krd. Program, sebesar Rp. 39 juta. Dengan demikian sektor Kontruksi adalah yang mendominasi jumlah kredit bermasalah yaitu sebesar Rp. 545 juta yaitu sebanyak 3 debitur dari sebanyak 7 debitur sektor konstruksi, yang dimungkinkan sulit pengembalian kreditnya dikarenakan telah terjadi wanprestasi. Lebih lanjut akan penulis jelaskan pada Bab berikutnya.

Tabel 2. Penyaluran KMK Konstruksi Terhadap Total Kredit Yang Diberikan BJB Cabang Bekasi

No	Keterangan	2010		2011	
		Rp	Common Size	Rp	Common Size
1	KMK Umum	2.431	4,25%	4.872	6,30%
2	KI Umum	5.300	9,26%	11.157	14,42%
3	KMK Konstruksi	420	0,73%	1.095	1,42%
4	Krd. Guna Bhakti	47.824	83,61%	59.912	77,44%
5	Krd. Program	1.228	2,15%	326	0,42%
	Jumlah	57.202	100%	77.362	100%

Tabel 3. Perkembangan Kredit Bank Jabar Banten Cabang Bekasi Tahun 2010 s/d 2011

No	Keterangan	2010	2011	Kenaikan	%
6	KMK Umum	2.431	4.872	2.441	100,41
7	KI Umum	5.300	11.157	5.857	110,51
8	KMK Konstruksi	420	1.095	675	160,71
9	Krd. Guna Bhakti	47.824	59.912	12.088	25,28
10	Krd. Program	1.228	326	-902	-73,45

	Jumlah	57.202	77.362	20.160	35,24
--	--------	--------	--------	--------	-------

Pada table 3, dari total kredit yang diberikan, sektor Kredit Konstruksi yang telah disalurkan sebesar Rp. 1.095 juta sampai dengan tahun 2011, dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 675 juta atau naik sebesar 160,71% dari posisi tahun 2010 sebesar Rp. 420 juta.

Tabel 4. Data Kualitas Kredit Yang Diberikan Bank Jabar Banten Cabang Bekasi

No	Keterangan	Lancar	Dpk.	KL	Dirag.	Macet	Jumlah	%
1	KMK Umum	4.583	132	101	14	42	4.872	6,30
2	KI Umum	10.758	142	229	15	13	11.157	14,42
3	KMK Konstruksi	550	495	0	0	50	1.095	1,42
4	Krd. Guna Bhakti	59.684	162	60	0	6	59.912	77,44
5	Krd. Program	287	5	0	4	30	326	0,42
	Jumlah	75.862	936	390	33	141	77.362	100

Dengan demikian apabila dilihat pada table 4 sampai dengan tahun 2011, dari total kredit yang diberikan sebesar Rp. 77.362 juta, didominasi oleh sektor Kredit Guna Bhakti yaitu sebesar 77,44% atau sebesar Rp. 59.912 juta, tetapi walaupun demikian NPLnya jauh lebih rendah yaitu sebesar 0,11% dibandingkan KMK Konstruksi yaitu 0,22%.

Tabel 5. Data Kualitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Terhadap Jumlah Kredit Diberikan Bank Jabar Banten Cabang Bekasi Tahun 2011

No	Keterangan	Deb.	Jumlah	%	Kualitas	NPL (%)
1	Lancar	4	550	0	0	0
2	Depersus	2	495	25	123,75	0,16
3	Kurang Lancar	0	0	50	0	0
4	Diragukan	0	0	75	0	0
5	Macet	1	50	100	50	0,06
	Jumlah	7	1.095		173,75	0,22

Dari data tersebut diatas kredit modal kerja sektor konstruksi adalah yang mendominasi jumlah kredit bermasalah yaitu sebesar Rp. 545 juta yaitu sebanyak 7 debitur, hal tersebut dapat dilihat pada table 5. Dan setelah diperhitungkan berdasarkan kualitas kreditnya (AKYDTP) adalah sebesar Rp. 173,75 juta, dengan NPL (Non Performing Loan) terhadap jumlah kredit yang diberikan 0,22% (Rp. 173,75 juta/Rp. 77.362 juta x 100). Dan dari sebanyak 7 debitur untuk sektor konstruksi terdapat 3 debitur dengan jumlah kredit

sebesar Rp. 545 juta dimungkinkan sulit pengembalian kreditnya dikarenakan telah terjadi wanprestasi. Permasalahan tersebut tidak terlepas pula dengan Sumber Daya Manusia pada Bank, karena sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan administrasi pemberian kredit kurang memadai baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya perlu ada peningkatan. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena dalam setiap pelaksanaan untuk mencapai tujuan organisasi, pengaruh dan factor manusia paling dominan.

Tabel 6. Perkembangan Aktiva Kredit Yang Tidak Produktif Kredit Konstruksi

Tahun	Kolektibilitas Kredit Konstruksi						AKYTP	TOTAL KREDIT
	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH		
2009	100	0	0	0	0	100	0	43.447
2010	420	0	0	0	0	420	0	57.202
2011	550	495	0	0	50	1.095	173,75	77.362

## KESIMPULAN

Berdasarkan data dan sumber yang dibahas serta fakta yang muncul dalam kasus Bank Jabar Banten Cabang Bekasi dapat diambil kesimpulan yaitu Pengaruh penyaluran kredit sektor konstruksi sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 1.095 juta dari total kredit yang diberikan sebesar Rp. 77.362 atau kontribusinya hanya sebesar atau 1,42%. Tetapi Pengaruh dalam menentukan kesehatan kredit ditinjau dari kolektibilitasnya cukup besar kontribusinya. Potensi kerugian Bank Jabar Banten Cabang Bekasi pada sektor kontruksi sebesar Rp. 174 juta dengan NPL (Non Performing Loan) terhadap jumlah kredit yang diberikan yaitu sebesar 0,22% dari NPL keseluruhan sebesar 0,77%. Sehingga dari data tersebut diatas kredit modal kerja sektor kontruksi adalah yang mendominasi jumlah kredit bermasalahnya yang dimungkinkan sulit pengembalian kreditnya dikarenakan telah terjadi wanprestasi sebesar Rp. 545 juta yaitu sebanyak 3 debitur dari sebanyak 7 debitur. Kredit konstruksi yang bermasalah secara umum disebabkan oleh (a) Itikad tidak baik dari debitur dimana pencairan termyn disalurkan ke bank lain, (b) Kelemahan dalam tahap pemberian kredit, dimana pencairan kredit tidak sesuai dengan kebutuhan proyek, pencairan dilaksanakan secara sekaligus, (c) Kurang melakukan koordinasi/komunikasi secara aktif dengan bowheer, (d) Kurang koordinasi dengan Bank pengelola Kas Daerah, yang pembayaran termyn proyeknya melalui Kas Daerah Kabupaten, (e) Kurangnya monitoring supervise kredit atas proyek yang

telah dibiayai Bank Jabar Banten Cabang Bekasi, (f) Kurang koordinasi dan komunikasi dengan instansi dan bank lain sebagai pembayar termyn proyek, sehingga termyn lupa terpotong, (g) Sistem dan prosedur perkreditan kurang dipatuhi, (h) Kurangnya Supervisi dan pembinaan kepada nasabah.

Timbulnya Permasalahan sebagaimana tersebut diatas, juga keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjang untuk pelayanan penyaluran kredit dan penanganan penyelesaian kredit konstruksi yang telah diberikan. Tingkat kualitas aktiva produktif sangat ditentukan oleh kualitas kredit. Kualitas kredit sangat dipengaruhi oleh kredit tidak lancar. Kredit tidak lancar merupakan resiko kerugian dari penyaluran kredit. Maka penyelesaian Kredit Konstruksi dalam rangka meningkatkan kualitas perkreditan selanjutnya secara keseluruhan dengan cara elakukan penagihan secara intensif terhadap debitur (Pemborong yang bermasalah), baik dilakukan oleh petugas intern (bagian Supervisi) maupun dengan meminta bantuan pihak KP3N/BUPLN (somasi), Melakukan intensitas pengawasan dan monitoringnya, Melakukan restrukturisasi kredit, salah satunya dengan cara pemberian kredit baru dengan di dukung SPK, hasil dari pembayaran proyek tersebut setelah dipotong secara proposional sisanya dipergunakan untuk menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak (kredit sebelumnya), Melalui penghapusan (write off) terhadap kredit yang sudah tidak dapat diselamatkan, dan selanjutnya diserahkan penyelesaiannya KP3N/BUPLN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7. (1992). sebagaimana diubah dengan nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Republik Indonesia, Keppres no. 16 Tahun (1994) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Bank Indonesia, Surat Keputusan No. 30/11/KEP/DIR. (1997) Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UPPB dan Surat Keputusan 31/147/KEP/DIR/ tanggal 12 Nopember (1998) perihal Kualitas Aktiva Produktif.
- Bank Jabar Banten, Surat Edaran No. 03/SE-DIR/97 tanggal 23 Januari (1997), prihal : Pemberian Kredit Dalam Rangka pelaksanaan Keppres..
- Bank Jabar Banten, Surat Keputusan No. 43/SK-DIR/PKD/2000 tanggal 3 Maret 2000 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan.
- Bank Jabar Banten, Surat Edaran No. 03/SE-DIR/PKD/2011, tanggal 12 Januari (2011), tentang Administrasi Kredit Modal Konstruksi.